



**RENSTRA MAJELIS ADAT ACEH
KOTA BANDA ACEH**

TAHUN 2013 – 2017



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT MAA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2012**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh berhasil menyusun Rencana Strategik (RENSTRA) Sekretariat MAA periode tahun 2013 – 2017.

Rencana Strategik Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2017 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2017.

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategik (RENSTRA) diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran sekretariat MAA menyelenggarakan tugas administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga MAA yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra. Dari sini dapat dikatakan, Renstra menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat MAA Kota Banda Aceh.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan dari pihak – pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Banda Aceh, 15 Oktober 2012

**KEPALA SEKRETARIAT MAA
KOTA BANDA ACEH**

RAHMAT SAIFUL BAHRI,S.Sos,SE,MM

Pembina Tk,I/ Nip.19670918 199102 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT MAA.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat MAA.....	10
2.2. Sumber Daya SKPD.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat MAA Kota Banda Aceh.....	19
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	20
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	21
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	22
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	23
4.1. Visi dan Misi	23
4.2. Tujuan dan Sasaran	24
4.3. Strategi dan Kebijakan	26
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	35
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Majelis Adat Aceh	18
Tabel 2.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Majelis Adat Aceh	18
Tabel 3.2 : Matriks Isu Strategis	22
Tabel 4.1 : Indikator kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	25
Tabel 4.3.1 : Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal.....	28
Tabel 4.3.2 : Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)	28
Tabel 4.3.3 : Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)	29
Tabel 4.3.4 : Strategi Berdasarkan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	30
Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat MAA Kota Banda Aceh.....	37
Tabel 6.1. : Indikator kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	38
Tabel 6.2. : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banda Aceh.....	38
Tabel 6.3. : Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Banda Aceh.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Era otonomi daerah telah mengubah paradigma perencanaan pembangunan daerah, yaitu dari sistem perencanaan sentralistik menjadi sistem perencanaan desentralisasi atau sistem dari atas ke bawah (Top-Down) ke sistem dari bawah ke atas (Bottom-up), dari pembangunan daerah menjadi daerah membangun.

Dengan adanya perubahan paradigma perencanaan tersebut, maka setiap daerah diberikan kebebasan untuk menentukan arah pembangunannya berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Rencana Stratejik (RENSTRA) merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Stratejik (RENSTRA) adalah sebuah dokumen perencanaan teknis strategik yang menjadi landasan dan acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, memuat penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBK Banda Aceh.

Renstra merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh merupakan Lembaga Non Struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Majelis Adat Aceh (MAA)

Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas “ *Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota, menyusun konsep Adat dan Adat Istiadat berbasis Islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas MAA Kota Banda Aceh memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat di Indonesia;
- 2) Peningkatan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah;
- 3) Peningkatan penyebarluasan adat Aceh kedalam masyarakat melalui *Keureja Udep dan Keureja Mate*, penampilan kreaktifitas dan mass media;
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim;
- 5) Pengawasan penyelenggaraan Adat Istiadat dan Hukum Adat supaya tetap sesuai dengan syariat islam;
- 6) Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
- 8) Pelaksanaan partisipasi dalam penyelenggaran pekan kebudayaan baik lokal maupun nasional; dan
- 9) Perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan “ *Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana*”.

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh sebagai unsur yang membantu MAA dalam melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan guna mewujudkan peran MAA

dalam upaya pengembangan sistem Adat dan Istiadat berbasis Islami dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5* tahun 2010 tentang *Keistimewaan Aceh*. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat MAA diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2011.

Sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maka disusunlah Rencana Strategik (RENSTRA) Sekretariat MAA Kota Banda Aceh tahun 2013-2017 yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat MAA Kota Banda Aceh tahun 2013-2017, disusun berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi kekinian Kota Banda Aceh. Lingkungan strategis lainnya yang turut dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra ini adalah Pilkada yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 2012, dan terpilihnya pimpinan Pemerintahan Kota Banda Aceh yang baru sehingga menjadi dasar berpijaknya perumusan dan penyempurnaan Renstra ini yang dapat mendukung kebijakan Kota Banda Aceh ke depan.

Renstra disusun dengan latar belakang sebagai berikut :

1. Untuk merespon perubahan lingkungan karena kondisi lingkungan yang cepat berubah dan yang penuh dengan ketidakpastian;
2. Untuk mengatur hasil yang dicapai;
3. Untuk alat manajerial yang penting;
4. Untuk orientasi ke masa depan;
5. Untuk dapat dilakukan penyesuaian seperlunya;
6. Untuk memenuhi kebutuhan publik;
7. Untuk menjadi dokumen perencanaan.

Pengertian perencanaan strategis adalah:

Pertama : Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Kedua : Proses yang sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur tingkat keberhasilannya.

Ketiga : Langkah awal pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Keempat : Tahapan perencanaan yang konsisten pada pencapaian hasil atau tujuan dan berkelanjutan tapi dapat mengikuti perubahan dalam arti perbaikan proses strategi pencapaian tujuan.

Kelima : Sejumlah langkah atau taktik yang dirancang sebagai komitmen organisasi. Master plan atau rencana induk bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuannya dengan keunggulan dan kelemahan kompetitifnya. Kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan untuk kelangsungan hidup.

Keenam : Serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Perencanaan yang dimaksudkan untuk mengarahkan segenap potensi yang ada untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tujuan yang akan dicapai tersebut terlebih dahulu dirumuskan dalam suatu gambaran masa depan yang ingin diwujudkan yang lebih dikenal dengan visi. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan visi tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam beberapa misi

yang harus dijalankan, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Perencanaan strategis dilingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh disusun untuk kemudian menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun perencanaan strategis satuan kerja perangkat daerah atau Renstra SKPD, termasuk untuk penyusunan Renstra Sekretariat MAA Kota Banda Aceh.

Perencanaan strategis bagi satuan kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh menjadi sangat penting karena dapat membantu dan menentukan arah masa depan satuan kerja perangkat daerah sekaligus mendukung visi dan misi organisasi Pemerintahan Kota Banda Aceh.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perencanaan Stratejik (Renstra) MAA Kota Banda Aceh untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki MAA Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan fungsi MAA sebagai service staff maupun dalam fungsi auxiliary staff dan dijadikan acuan lebih lanjut dilingkungan Sekretariat MAA Kota Banda Aceh

Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Banda Aceh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra MAA Kota Banda Aceh disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi MAA Kota Banda Aceh dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
 1. Menyediakan suatu tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja.
 2. Menjabarkan visi, misi, pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM;
 3. Memudahkan MAA untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah;

4. Memudahkan aparatur MAA Kota Banda Aceh dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Tujuan Renstra MAA Kota Banda Aceh adalah:

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja MAA Kota Banda Aceh.
3. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Stratejik MAA Kota Banda Aceh tahun 2013 - 2017 didasarkan pada :

- A. Landasan Ideal: Pancasila
- B. Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945
- C. Landasan Operasional:
 - 1) Undang-undang No. 8 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 - 3) Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4) Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
 - 5) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
 - 6) Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

- 7) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 12) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 13) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
- 14) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 15) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 16) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
- 18) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah;
- 19) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 22) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 - 2029;
- 25) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 5 seri D Nomor 2);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 27) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh;
- 28) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural di Lingkungan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat MAA Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT MAA KOTA BANDA ACEH
 - 2.1. Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat MAA Kota Banda Aceh
 - 2.2. Sumber Daya Sekretariat MAA Kota Banda Aceh
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat MAA Kota Banda Aceh

- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat MAA Kota Banda Aceh
 - 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
- 4.1. Visi dan Misi Sekretariat MAA Kota Banda Aceh
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran
 - 4.3. Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT MAA KOTA BANDA ACEH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh adalah suatu lembaga independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK, merupakan wadah untuk meningkatkan peran Tokoh Adat dalam pembangunan Kota Banda Aceh. Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2011.

Majelis Adat Aceh (MAA) dan Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh berperan aktif dalam menentukan kebijakan daerah. Kedudukan MAA kembali diperkuat dengan lahirnya Undang Undang No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Susunan Organisasi MAA terdiri dari :

a. Pimpinan MAA

- 1 orang ketua
- 2 orang wakil ketua

Pimpinan mempunyai tugas memimpin, memberikan pertimbangan, menyusun konsep Adat dan Adat Istiadat berbasis Islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kepala Bidang

Bidang-bidang mempunyai tugas membuat program operasional yang berkenaan dengan tupoksinya, menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data dan melakukan pembahasan awal serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MAA.

Kepala Bidang terdiri dari:

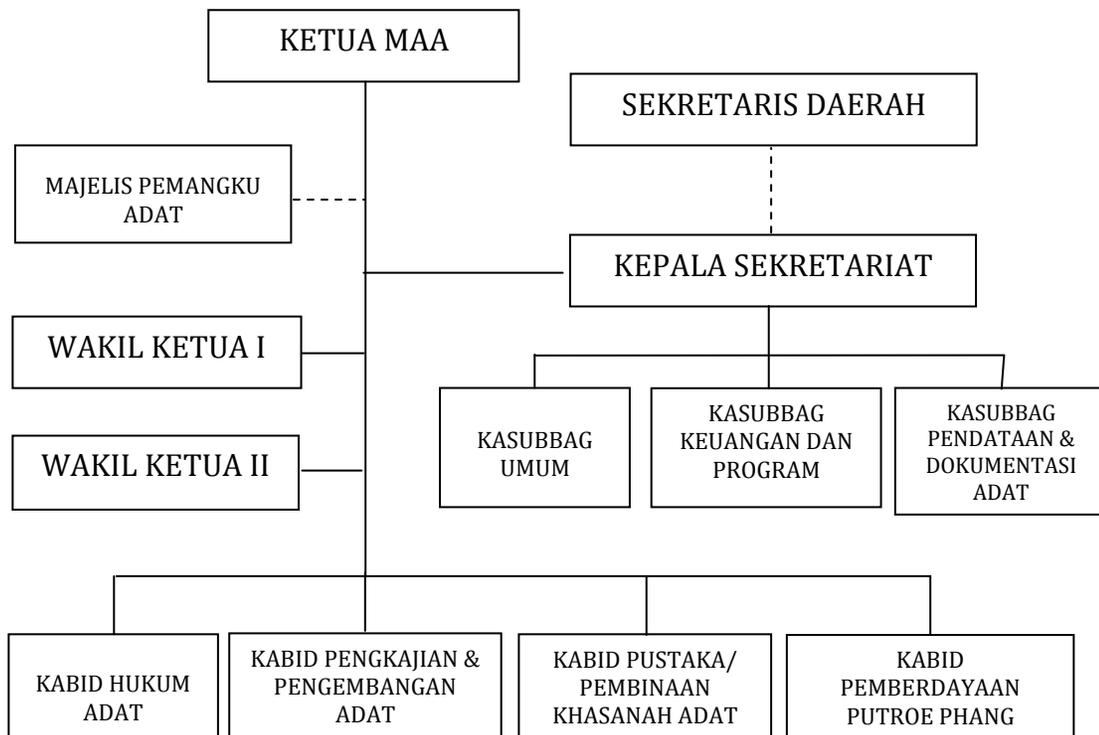
- a. Kepala Bidang Hukum Adat;
- b. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Adat;

- c. Komisi Bidang Pustaka/Pembinaan Khasanah Adat; dan
- d. Komisi Bidang Pemberdayaan Putroe Phang.

Sedangkan Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat MAA Kota Banda Aceh susunan organisasi terdiri dari:

- 1) Kepala Sekretariat
- 2) Kepala Subbagian Umum
- 3) Kepala Subbagian Keuangan dan Program
- 4) Kepala Subbagian Pendataan dan Dokumentasi Adat.

Tabel. 2.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT MAA
KOTA BANDA ACEH



1) Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga MAA.

2) Kepala Sub Bagian :

- Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Subbagian Umum;
 - b. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan MAA;
 - c. melaksanakan urusan, rumah tangga, perlengkapan dan keamanan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. Melaksanakan fasilitas rapat anggota MAA;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Subbagian Umum;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sekretariat MAA.
- Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja (renja) dan petunjuk teknis dibidang keuangan dan program Sekretariat MAA;
 - b. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan Sekretariat MAA;
 - c. Menghimpun dokumen penyusunan RKA dan DPA Sekretariat MAA;
 - d. Menghimpun dokumen penyusunan kebutuhan kas Sekretariat MAA;
 - e. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran dilingkungan Sekretariat MAA;
 - f. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat MAA;
 - g. Melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat MAA;

- h. Menyiapkan surat perintah membayar (SPM) Sekretariat MAA;
 - i. Memfasilitasi penyusunan Renstra, RKT, dan Tapkin dilingkup Sekretariat MAA;
 - j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pada Subbagian Keuangan dan program;
 - k. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sekretariat MAA.
- Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi Adat, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada Subbagian Pendataan dan Dokumentasi Adat;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pidato/sambutan kepala sekretariat/pimpinan MAA;
 - c. Melaksanakan pendataan terhadap adat-istiadat yang pernah berkembang pada masyarakat;
 - d. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terkait adat-istiadat; Melaksanakan fasilitasi terhadap pengdokumentasian adat-istiadat yang pernah berkembang pada masyarakat;
 - e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Subbagian Pendataan dan Dokumentasi Adat;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sekretariat MAA.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat MAA secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MAA dan

secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Setiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat MAA.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2011 : *menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga MAA Kota.* Dalam melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat MAA menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA.
2. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan Sekretariat MAA. Penyusunan Program Sekretariat MAA.
3. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MAA.
4. Penyiapan dan pendataan dokumentasi adat.
5. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat MAA.
6. Penyusunan rencana, penelahaan dan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan MAA.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MAA.
8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesekretariatan MAA.
9. Pelaporan pertanggungjawaban Sekretariat MAA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya SKPD

Susunan kepegawaian dilingkungan Sekretariat MAA Kota Banda Aceh menurut jumlah pemangku jabatan struktural dan non struktural, pangkat dan golongan serta tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.2
Data Pegawai Sekretariat MAA Kota Banda Aceh Tahun 2012

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Pangkat golongan:	
	IV	2 orang
	III	11 orang
	PNS Honorer/Kontrak	2 orang
Jumlah		15 orang
2	Jabatan :	
	Struktural	4 orang
	Non Struktural	9 orang
	Honorer/Kontrak	2 orang
Jumlah		15 orang
3	Eselon:	
	IIIa	1 orang
	IVa	3 orang
	Non Eselon	9 orang
Honorer/Kontrak		2 orang
Jumlah		12 orang
4	Pendidikan:	
	S2	1 orang
	S1	11 orang
	SLTA	3 orang
Jumlah		15 orang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas di Sekretariat MAA Kota Banda Aceh diperlukan perlengkapan/sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penunjang tugas Sekretariat MAA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.3
Sarana dan Prasarana Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	1	1	-	-	Pinjam

						Pakai
2	Gedung Kantor	1	1	-	-	Pinjam Pakai
3	Kendaraan roda 4	1	1	-	-	
4	Kendaraan roda 2	1	1	-	-	
5	Mesin ketik Besar	1	1	-	-	
6	Absensi elektronik	1	1	-	-	
7	Kalkulator	5	5	-	-	
8	Lemari Arsip	4	4	-	-	
9	Filing Kabinet	4	4	-	-	
10	Papan nama kantor	1	1	-	-	
11	Papan Whiteboard	1	1	-	-	
12	Kursi kerja	15	13	2	-	
13	Kursi Putar	3	3	-	-	
14	Sofa/kursi tamu	1	-	1	-	
15	Meja Komputer	3	3	-	-	
16	Meja Biro	3	3	-	-	
17	Meja ½ Biro	12	10	2	-	
18	Jam dinding	3	3	-	-	
19	AC split	2	2	-	-	
20	Exchaus Fan	2	2	-	-	
21	Kipas angin	2	1	-	1	
22	Wireless	1	1	-	-	
23	Komputer/PC	7	7	-	-	
24	Komputer Notebook	3	3	-	-	
25	Printer	5	4	-	1	
26	Hardisk Eksternal	1	1	-	-	
27	UPS/Stabilizer	4	4	-	-	
28	Kamera Digital	2	2	-	-	
29	Handy Cam	1	1	-	-	
30	Dispenser	1	1	-	-	
31	Telepon/Facsmilie	1	1	-	-	
32	Terali besi jendela	5	5	-	-	40 m2

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat MAA Kota Banda Aceh

Sebagai dasar untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan organisasi, bagian organisasi dan personil organisasi perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi digunakan pengukuran kinerja. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Adapun yang dimaksud dengan :

- Indikator masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- Indikator keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
- Indikator hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- Indikator manfaat (*Benefits*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- Indikator dampak (*Impacts*) adalah segala sesuatu yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen untuk:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati

5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi

Dalam pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Metode Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap serta tepat waktu. Data kinerja diperoleh melalui dua cara, yaitu :

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi.
2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Kinerja pelayanan Sekretariat MAA Kota Banda Aceh ini mengacu tabel yang perlu disajikan yaitu Tabel 2.1. dan Tabel. 2.2. dengan format sebagai berikut:

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Rancangan RENSTRA karena menjadi dasar utama visi dan misi dalam RPJM Daerah. Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012 - 2017. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat MAA Kota Banda Aceh

Permasalahan Kota Banda Aceh merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan sebagai hasil dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan syariat islam;
2. Memudarnya adat istiadat dalam masyarakat;
3. Masih kurangnya peran Gampong dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat

Setiap aktifitas masyarakat selalu membawa nilai nilai agama (Islam). sehingga terbangun tata kehidupan masyarakat yang islami berdasarkan pengamalan Syariat Islam secara benar yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Selain itu juga perlu dilakukan pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat, pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim, penyebarluasan adat istiadat Aceh kedalam masyarakat melalui penampilan kreatifitas dan seni budaya aceh dalam partisipasi penyelenggaraan pekan kebudayaan baik lokal

maupun nasional, pengawasan penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan syari'at islam dan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan "*Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana*."

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. (Kota Madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab) untuk mencapai "**BANDA ACEH MODEL KOTA MADANI**".

Sedangkan Misi adalah sesuatu kondisi/keadaan/tatanan yang mengandung nilai berharga dan mulia yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Untuk mewujudkan Kota Madani Banda Aceh, maka perlu adanya Misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah;
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan;
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami;
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik, perlindungan anak dan kelompok marjinal;
7. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

PROGRAM/KEGIATAN

Program dan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah satunya, meningkatkan kualitas pengamalan Agama menuju pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah. Setiap aktifitas masyarakat selalu membawa nilai nilai agama (Islam). sehingga terbangun tata kehidupan masyarakat yang islami berdasarkan pengamalan Syariat Islam secara benar yang sesuai antara perkataan dan perbuatan, menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. masyarakat yang sehat jasmani dan rohani serta dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memajukan kehidupannya secara benar sesuai dengan nilai nilai seni dan budaya keaceh-an yang islami sehingga dapat hidup secara bermartabat, meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota. Pemuda memiliki kemampuan dan kreatifitas yang tinggi sebagai agen perubahan sosial dan benteng pertahanan masyarakat. Karena itu pemuda harus dapat berperan aktif sebagai kekuatan untuk mempercepat pembangunan kota dan menjaga tata nilai dan tata kehidupan masyarakat kota.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Rencana Stratejik (RENSTRA) adalah sebuah dokumen perencanaan teknis stratejik yang menjadi landasan dan acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, memuat penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBK Banda Aceh.

Renstra merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra disusun dengan latar belakang untuk merespon perubahan lingkungan karena kondisi lingkungan yang cepat berubah dan yang penuh dengan ketidakpastian, mengatur hasil yang dicapai, sebagai alat manajerial yang penting, untuk orientasi ke masa depan, dapat dilakukan penyesuaian seperlunya dengan memenuhi kebutuhan publik dan untuk menjadi dokumen perencanaan.

3.1 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan isu-isu strategis yang mengemuka, maka diperoleh beberapa isu strategis sebagai hasil dari penilaian, yang diperkirakan dapat memberi manfaat dan pengaruh dalam kurun waktu 2013-2017 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan syariat islam;
2. Lunturnya nilai syariat islam dalam adat istiadat masyarakat;
3. Masih kurangnya peran Gampong dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat

Isu Strategis tersebut dapat dilihat pada Matriks Isu Strategis Seminar Internasional Visi Kota Banda Aceh dibawah ini:

Tabel. 3.2

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. MAA Kota Banda Aceh saat ini juga untuk masa-masa yang akan datang harus mampu membangun masyarakat Kota Banda Aceh yang bermartabat yang berlandaskan Adat istiadat yang bersendikan pada ajaran islam, maka Visi Sekretrariat MAA Kota Banda Aceh yang sejalan dengan Visi Kota Banda Aceh yaitu **BANDA ACEH MODEL KOTA MADANI**.

“Membangun masyarakat Kota Banda Aceh dalam Model Kota Madani Berlandaskan Adat Istiadat Yang Bersendikan Ajaran Islam”

Misi adalah sesuatu kondisi/keadaan/tatanan yang mengandung nilai berharga dan mulia yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Untuk dapat mewujudkan dari pada Visi tersebut, maka harus dijabarkan kedalam bentuk misi-misi. Dengan merumuskan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui atau mengenal keberadaan dan peranan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Adapun Misi MAA Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji norma-norma Adat/Adat istiadat berlandaskan “Adat Bak Po Teumeuruhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana dan Adat Ngon Hukum (agama) Lage zat ngon sifeut” merupakan sumber nilai utama dalam membangun kehidupan masyarakat untuk mendukung perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan Islam bagi kesejahteraan serta melibatkan peran serta

masyarakat dan tokoh adat dalam pelaksanaan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Meningkatkan kapasitas aparaturnya pemerintah dalam kualitas pelayanan pemerintahan dan berpartisipasi semua elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai Adat/Adat Istiadat dalam Hukum Adat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam perkembangan budaya global dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam.

Nilai-Nilai Utama

Nilai-nilai, ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup, adat istiadat, berdasarkan Syariat Islam merupakan modal yang sangat berharga, disamping keistimewaan yang terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh. Menghadapi berbagai tantangan ke depan Pemerintah Kota Banda Aceh merumuskan pedoman dalam merumuskan kebijakan antara lain:

1. **Ketaqwaan**, dengan menjalankan segala kewajiban, menjauhi semua larangan dan *syubhat* (perkara yang samar), selanjutnya melaksanakan perkara-perkara *sunnah (mandub)*, serta menjauhi perkara-perkara yang *makruh* (dibenci).
2. **Profesionalisme**, dengan pengetahuan, ketrampilan, keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan tugas atau pengabdian, yang dilandasi dengan penuh dedikasi dan kesadaran tinggi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
3. **Kejujuran**, adalah suatu nilai dimana sikap dan ucapan yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, memberitakan kebenaran tanpa diganti, diubah, dikurangi atau ditambah. Kejujuran merupakan suatu sikap dimana satu ucapan sama dengan satu perbuatan.

4. **Keterbukaan**, adalah suatu nilai memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses / mendapatkan pelayanan dan informasi secara baik dan benar.
5. **Keadilan**, dengan memberikan hak-hak dasar yang sama kepada se tiap orang, dengan tanpa membedakan kelompok, golongan, gender dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Sekretariat MAA Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat MAA Kota Banda Aceh beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 bertujuan untuk mewujudkan **Banda Aceh model kota madani**. Melalui Strategi dan arah kebijakan untuk tercapainya tujuan tersebut. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh MAA Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang memberi kepuasan kepada masyarakat
2. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas melalui pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
3. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi melalui peningkatan disiplin aparatur.
4. Memfasilitasi kegiatan musyawarah, lokakarya MAA serta memperkuat kualitas kelembagaan MAA.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya diterapkan analisis SWOT.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strengths dan weaknesses*) dan kondisi eksternal organisasi (*opportunities dan threats*), maka kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang melekat baik pada pemerintah maupun masyarakat dapat diidentifikasi atas keempat aspek positif dan negative dari organisasi di dalam menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Analisis terhadap lingkungan internal MAA Kota Banda Aceh memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths)

1. Tersedianya pegawai dan anggota MAA
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang

Kelemahan (weaknesses)

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan professional aparatur
3. Tidak meratanya beban kerja
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi
6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal MAA Kota Banda Aceh memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:

Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota
2. Adanya regulasi tentang kedudukan Majelis Adat Aceh
3. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi

Tantangan (threats)

1. Belum kuatnya regulasi karena belum dituangkan dalam Qanun
2. Adanya tuntutan peningkatan peran serta MAA
3. Pengaruh globalisasi terhadap usaha penerapan Pendidikan berbasis Islami.

1. Penceramatan Lingkungan Strategik

Penceramatan Lingkungan Stratejik adalah untuk mencermati tentang "kekuatan" dan "Kelemahan" internal, " Tantangan dan Peluang" eksternal MAA Kota Banda Aceh, masa kini dan berorientasi yang diperkirakan akan muncul di masa depan .

Penceramatan Lingkungan Stratejik meliputi antara lain situasi dan kondisi awal MAA Kota Banda Aceh (struktur, penempatan personil, efektifitas, kegiatan), efektifitas komunikasi antar unit, sumberdaya dan pemberdayaannya, serta faktor-faktor lain yang mendukung terwujudnya peran MAA secara lebih aktif dalam Pendidikan berbasis Islami.

Tabel 4.3.1
Penceramatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI	PLE
<p style="text-align: center;"><u>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya pegawai dan anggota MAA2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas3. Adanya kerjasama antar staf yang baik4. Tersedianya sarana kerja yang memadai5. Adanya komitmen pimpinan	<p style="text-align: center;"><u>Peluang (<i>Opportunities</i>)</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya donor dan hibah2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota3. Adanya regulasi tentang kedudukan tokoh adat4. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi.

<u>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</u>	<u>Tantangan (<i>Threats</i>)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya motivasi kerja aparatur 2. Rendahnya kemampuan professional aparatur 3. Tidak meratanya beban kerja 4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian 5. Terbatasnya sarana dan prasarana 6. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi 7. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum kuatnya regulasi karena belum dituangkan dalam Qanun 2. Adanya tuntutan peningkatan peran serta MAA 3. Pengaruh globalisasi terhadap usaha penerapan adat dan adat istiadat berbasis Islami

Tabel 4.3.2
Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

No	Faktor-Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Score	Prioritas
1.	<u>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</u>				
	1. Tersedianya pegawai dan anggota MAA	15	4	60	I
	2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas	10	4	40	III
	3. Adanya kerjasama antar staf yang baik	5	3	15	VIII
	4. Tersedianya sarana kerja yang memadai	5	3	15	XI
	5. Adanya komitmen pimpinan	5	3	15	X
2.	<u>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</u>				
	1. Rendahnya motivasi kerja aparatur	10	3	30	V
	2. Rendahnya kemampuan professional aparatur	15	3	45	II
		5	4	20	VI
	3. Tidak meratanya beban kerja	5	3	15	IX
	4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian	10	4	40	IV
	5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi	5	3	15	XII
	6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya				
	JUMLAH	100			

Keterangan : R4 : Sangat menonjol, R3 : Menonjol, R2. kurang menonjol dan R1 : tidak menonjol.

Tabel 4.3.3
Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

No	Faktor-Faktor Eksternal Strategik	Bobot	Rating	Score	Prioritas
1.	<u>Peluang (<i>Opportunities</i>)</u>				
	1. Adanya donor dan hibah	10	3	30	VI
	2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota	15	4	60	III
	3. Adanya regulasi tentang kedudukan tokoh adat	15	4	60	IV
2.	4. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi	10	2	20	VIII
	<u>Tantangan (<i>Threats</i>)</u>				
	1. Belum kuatnya regulasi karena belum dituangkan dalam Qanun	15	3	30	V
	2. Adanya tuntutan peningkatan peran serta MAA	15	4	60	II
	3. Pengaruh globalisasi terhadap usaha penerapan adat dan adat istiadat berbasis Islami	20	4	60	I
JUMLAH		100			

Keterangan : R4 : Sangat menonjol, R3 : Menonjol, R2. kurang menonjol dan R1 : tidak menonjol.

Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal (KAFI-KAFE)

- **Dari keenam kekuatan (Strengths) dalam analisis pencermatan internal,** maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah;1). ketersediaan personil; 2). Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas; 3). Kerjasama antar staf yang baik
- **Dari keenam kelemahan (Weaknesses) dalam analisis pencermatan Internal,** maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah; 1). kemampuan profesional aparatur masih rendah ; 2). sistem dan mekanisme koordinasi belum efektif; 3). Rendahnya motivasi kerja aparatur; 4). Tidak meratanya beban kerja.
- **Dari keempat Peluang (Opportunities) dalam analisis pencermatan Eksternal,** maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah; 1). Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota; 2). Adanya donor dan NGO; 4) Adanya kemajuan iptek di bidang informasi.
- **Dari keempat Tantangan (Threats) dalam analisis pencermatan Eksternal,** maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah; 1). Pengaruh globalisasi

terhadap usaha penerapan adat dan adat istiadat berbasis Islami; 2). Adanya tuntutan peningkatan peran serta MAA; 3). Belum kuatnya regulasi karena belum dituangkan dalam Qanun.

Tabel 4.3.4
Strategi Berdasarkan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

External		Opportunities	Threats
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya donor dan NGO 2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota 3. Adanya regulasi tentang kedudukan MAA 4. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum kuatnya regulasi karena belum dituangkan dalam Qanun 2. Adanya tuntutan peningkatan peran serta MAA 3. Pengaruh globalisasi terhadap usaha penerapan Adat dan adat istiadat berbasis Islami
Internal		(SO)	(ST)
Strengths		(SO)	(ST)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pegawai dan anggota MAA 2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas 3. Adanya kerjasama antar staf yang baik 4. Tersedianya sarana kerja yang memadai 5. Adanya komitmen pimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja MAA melalui dukungan KDH 2. Meningkatkan kapasitas pegawai dengan pemanfaatan iptek dan kerjasama antar staf 3. Meningkatkan sarana kerja dengan bantuan lembaga donor 4. Memaksimalkan fungsi MAA dengan adanya komitmen pimpinan, dukungan regulasi, dana penunjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan seluruh pegawai dalam meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi 2. Komitmen pimpinan dalam mengakomodir tuntutan peningkatan peran MAA dalam penerapan adat dan adat istiadat berbasis Islami 3. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan baik MAA maupun sekretariat 4. Komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan kemampuan pegawai dan pengkaderan disegala bidang, 	

Weaknesses			(WO)		(WT)
1.	Rendahnya motivasi kerja aparatur	1.	Melakukan evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pemberian reward and punishment	1.	Mengupayakan pembagian beban kerja yang merata dalam organisasi
2.	Rendahnya kemampuan professional aparatur	2.	Memanfaatkan dukungan KDH dalam melakukan monitoring, pengendalian, dan koordinasi	2.	Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang perencanaan dan penganggaran
3.	Tidak merata beban kerja	3.	Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dalam peningkatan kapasitas pegawai	3.	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam menghadapi tantangan globalisasi
4.	Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian			4.	Melakukan pendekatan informal untuk peningkatan kapasitas kelembagaan
5.	Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi				
6.	Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya				

Dari analisis faktor internal dan eksternal diatas, ada empat strategi dasar yang digunakan meliputi :

- **Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang**, terdiri dari :
 - Meningkatkan kinerja MAA melalui dukungan KDH
 - Meningkatkan kapasitas pegawai dengan pemanfaatan iptek dan kerjasama antarstaf
 - Meningkatkan sarana kerja dengan bantuan lembaga donor
 - Memaksimalkan fungsi MAA dengan adanya komitmen pimpinan, dukungan regulasi

- **Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan**, terdiri dari :
 - Memberdayakan seluruh pegawai dalam meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi

- Komitmen pimpinan dalam mengakomodir tuntutan peningkatan peran ulama dalam penerapan syariat Islam
 - Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan baik MAA maupun sekretariat
 - Komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan kemampuan pegawai dan pengkaderan di segala bidang
- **Mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang, terdiri dari :**
- Melakukan evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar pemberian reward and punishment
 - Memanfaatkan dukungan KDH dalam melakukan monitoring, pengendalian, dan koordinasi
 - Melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dalam peningkatan kapasitas pegawai
- **Mengurangi kelemahan untuk meminimalkan tantangan, terdiri dari :**
- Mengupayakan pembagian beban kerja yang merata dalam organisasi
 - Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang perencanaan dan penganggaran
 - Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam menghadapi tantangan globalisasi
 - Melakukan pendekatan informal untuk peningkatan kapasitas kelembagaan

Berdasarkan kondisi existing, maka diperlukan suatu proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan atau pada tahun 2017. Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan MAA Kota Banda Aceh.

Berangkat dari kondisi yang terlihat pada saat ini, sekaligus dalam usaha serta untuk pencapaian kondisi visi, misi dan tujuan yang pada gilirannya

tercipta Banda Aceh sebagai Model Kota Madani perlu dilakukan secara serentak dan menyeluruh langkah – langkah perbaikan, antara lain :

- Kemauan dan kesungguhan dari seluruh pihak para pelaku, baik itu eksekutif, legislatif maupun masyarakat itu sendiri yang konsisten mengaplikasikan bahwa masalah pelaksanaan adat dan adat istiadat Berbasis Islami merupakan tanggungjawab bersama.
- Tersedianya SDM yang profesional dalam percepatan tercapainya Pendidikan berbasis Islami.
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung terlaksananya Pendidikan Islami.

Adapun proyeksi kondisi 5 (lima) tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur;
- c) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d) Peningkatan Disiplin Aparatur;
- e) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang profesional yang dilandasi iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya.;
- g) Peningkatan kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam pemahaman Adat Istiadat untuk pembangunan.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan tertentu.

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Program ke depan dilaksanakan untuk tahun 2013-2017 disusun berdasarkan sasaran strategis Sekretariat MAA Kota Banda Aceh yaitu :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
4. Penyemarakkan syiar Islam
5. Peningkatan kapasitas lembaga adat aceh

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan MAA Kota Banda Aceh adalah:

- A. Program/Kegiatan pada setiap SKPD :
 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
 - 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 1.8. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
 - 1.9. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
2. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - 2.1. Pendidikan dan pelatihan formal
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 3.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 3.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - 3.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - 3.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 3.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4.1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya.
- B. Program/Kegiatan Urusan Wajib :
1. Program Penyemarakkan Syiar Islam
 - 1.1. Perlombaan Dalail Khairat.
 - 1.2. Pembinaan dan perlombaan Zikir Aceh
 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh
 - 2.1. Pembinaan Majelis Adat Kecamatan
 - 2.2. Sosialisasi dan Pelatihan penyusunan Reusam Gampong
 - 2.3. Pelatihan Seumapa
 - 2.4. Sosialisasi Perlengkapan Adat Peusijuk

Penjabaran rencana dan program prioritas yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam bentuk program dan program prioritas secara sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam bentuk tabel-tabel berikut yaitu Tabel.5.1 dibawah ini:

Tabel.5.1

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT MAA
KOTA BANDA ACEH

Indikator kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut yaitu Tabel. 6.1, Tabel.6.2 dan Tabel.6.3.

Tabel 5.1
Bencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)
Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1	Terlaksananya Kegiatan Operasional (Rutin)		Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	85.32%	86%	398,780,000	88%	420,074,000	90%	441,193,000	95%	462,312,000	96%	483,431,000	99%	2,205,790,000	Majelis Adat Aceh	Kota Banda Aceh
				- Penyediaan jasa Komunikasi, Listrik & SDA	Lancarnya jasa komunikasi, Listrik dan SDA	45.11%	12 Bln	23,600,000	12 Bln	25,960,000	12 Bln	28,320,000	12 Bln	30,680,000	12 Bln	33,040,000	60 Bln	141,600,000		
				- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan kantor	92.60%	12 Bln	3,500,000	12 Bln	3,850,000	12 Bln	4,025,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,375,000	60 Bln	19,950,000		
				- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	99.50%	12 Bln	12,368,000	12 Bln	12,986,400	12 Bln	13,604,800	12 Bln	14,223,200	12 Bln	14,841,600	60 Bln	68,024,000		
				- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100.00%	12 Bln	7,500,000	12 Bln	7,875,000	12 Bln	8,250,000	12 Bln	8,625,000	12 Bln	9,000,000	60 Bln	41,250,000		
				- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penerangan kantor	99.94%	12 Bln	3,500,000	12 Bln	3,675,000	12 Bln	3,850,000	12 Bln	4,025,000	12 Bln	4,200,000	60 Bln	19,250,000		
				- Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai	94.53%	11 Bln	23,712,000	11 Bln	24,897,600	11 Bln	26,083,200	11 Bln	27,268,800	11 Bln	28,454,400	55 Bln	130,416,000		
				- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99.84%	12 Bln	30,000,000	12 Bln	31,500,000	12 Bln	33,000,000	12 Bln	34,500,000	12 Bln	36,000,000	60 Bln	165,000,000		
				- Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	Tersedianya pelelangan dan pengadaan barang dan jasa	100.00%	6 Bln	3,600,000	6 Bln	3,780,000	6 Bln	3,960,000	6 Bln	4,140,000	6 Bln	4,320,000	30 Bln	19,800,000		
				- Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	47.82%	12 Bln	291,000,000	12 Bln	305,550,000	12 Bln	320,100,000	12 Bln	334,650,000	12 Bln	349,200,000	60 Bln	1,600,500,000		
Tujuan 1	Sasaran 2	Terlaksananya Kegiatan Operasional (Rutin)		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	84.35%	55%	240,120,000	60%	252,126,000	65%	264,132,000	70%	276,138,000	75%	288,144,000	75%	1,320,660,000		
				- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	99.19%	12 Bln	106,400,000	12 Bln	111,720,000	12 Bln	117,040,000	12 Bln	122,360,000	12 Bln	127,680,000	60 Bln	585,200,000		
				- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	98.70%	12 Bln	95,000,000	12 Bln	99,750,000	12 Bln	104,500,000	12 Bln	109,250,000	12 Bln	114,000,000	60 Bln	522,500,000		
				- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	98.83%	12 Bln	34,720,000	12 Bln	36,456,000	12 Bln	38,192,000	12 Bln	39,928,000	12 Bln	41,664,000	60 Bln	190,960,000		
				- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100.00%	12 Bln	4,000,000	12 Bln	4,200,000	12 Bln	4,400,000	12 Bln	4,600,000	12 Bln	4,800,000	60 Bln	22,000,000		
Tujuan 1	Sasaran 3	Terlaksananya Kegiatan Operasional (Rutin)		Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99.43%	-	9,000,000	50%	6,300,000	60%	6,600,000	70%	6,900,000	80%	7,200,000	95%	36,000,000		
				- Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	100.00%	15 stel	6,000,000	18 stel	6,300,000	18 stel	6,600,000	19 stel	6,900,000	20 stel	7,200,000	90 stel	33,000,000		
				- Pengadaan Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus untuk pegawai	-	15 stel	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 stel	3,000,000		

Tujuan 2	Sasaran 1	Seluruh masyarakat dan Tokoh Adat			Program penyemarakkan syiar islam	Terbangun tata kehidupan masyarakat yang islami berdasarkan pengalaman Syari'at Islam		1 kali	124,405,000	1 kali	130,625,250	1 kali	136,845,500	1 kali	143,065,750	1 kali	149,286,000	9 kali	684,227,500		
					- Perlombaan Dalail Khairat	Terlaksananya lomba dalail khairat	9 kec	1 kali	75,000,000	1 kali	78,750,000	1 kali	82,500,000	1 kali	86,250,000	1 kali	90,000,000	5 kali	412,500,000		
					- Perlombaan Zikir Aceh	Terlaksananya lomba zikir aceh	9 kec	1 kali	36,195,000	1 kali	38,004,750	1 kali	39,814,500	1 kali	41,624,250	1 kali	43,434,000	5 kali	199,072,500		
					- Pembinaan Zikir Aceh	Terlaksananya pembinaan zikir aceh	-	3 kali	13,210,000	2 kali	13,870,500	2 kali	14,531,000	1 kali	15,191,500	1 kali	15,852,000	9 kali	72,655,000		
Tujuan 2	Sasaran 2	Seluruh masyarakat dan Tokoh Adat			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh	Meningkatnya peranan Gampong dalam penyelenggaraan adat istiadat dan	-		416,304,500		228,283,335		210,716,000		220,294,000		229,872,000	90 gp	1,305,469,835		
					- Pembinaan Majelis Adat Kecamatan	Terlaksananya pembinaan majelis adat dikecamatan	-	9 kali	126,462,100		-		-		-		-	9 kali	126,462,100		
					- Sosialisasi dan Pelatihan Reusam Gampong	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan reusam gampong	-	90 gp	72,429,700		-		-		-		-	90 gp	72,429,700		
					- Pelatihan Seumapa	Terlaksananya pelatihan seumapa	-	5 klp	25,852,700	5 klp	27,145,335		-		-		-	10 klp	52,998,035		
					- Sosialisasi Perlengkapan Adat Peusujuk	Terlaksananya sosialisasi perlengkapan adat peusujuk	-	20 gp	191,560,000	20 gp	201,138,000	15 gp	210,716,000	20 gp	220,294,000	15 gp	229,872,000	90 gp	1,053,580,000		
Tujuan 2	Sasaran 3	Seluruh masyarakat dan Tokoh Adat			Program Pelestarian Adat-istiadat sesuai dengan Syariat	Tercapainya Pelestarian Adat Istiadat yang ada dalam masyarakat sesuai dengan Syari'at Islam	-	45 gp	90,855,000	45 gp	98,000,000		-		-		-	90 gp	188,855,000		
					- Pendataan adat istiadat yang ada dalam masyarakat	Terdatanya adat istiadat yang ada dalam masyarakat	-	45 gp	90,855,000	45 gp	98,000,000		-		-		-	90 gp	188,855,000		
Jumlah									1,279,464,500		1,135,408,585		1,059,486,500		1,108,709,750		1,157,933,000		5,741,002,335		